

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program transmigrasi merupakan salah satu program Pemerintah dalam upaya membantu perekonomian masyarakat. Program transmigrasi oleh Pemerintah di laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya transmigran, peningkatan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.¹ Dapat di katakana pula bahwa program transmigrasi pada intinya adalah membuka dan memberikan kesempatan berusaha kepada seluruh masyarakat yang benar-benar ingi berusaha/berswakarsa dalam upaya peningkaatn kesejahteraan hidup. Pada umumnya yang lebih banyak mengikuti program transmigrasi adalah masyarakat ekonomi bawah/kurang mampu. Mereka ini pada umumnya berharap bahwa program ini dapat membantu mengatasi masalah sosial ekonominya. Selebihnya untuk kehidupan yang di alami masyarakat mendatang akan lebih baik/meningkat. Meskipun pada umumnya yang lebih banyak mengikuti program transmigrasi ini adalah lapisan masyarakat ekonomi bawah, namun sesungguhnya program transmigrasi ini di buka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam istilah transmigrasi terdapat 3 (tiga) jenis program transmigrasi yakni; Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan Transmigrasi Swakarsa

Berbantuan.² Ketiga jenis transmigrasi tersebut di atas merupakan jenis transmigrasi yang sudah di selenggarakan oleh Pemerintah. Namun yang lebih sering di buka adalah program transmigrasi jenis umum. Untuk transmigrasi jenis swakarssa mandiri dan berbantuan pada umumnya baru di buka setelah ada inisiatif dari masyarakat sendiri.

Dalam sebuah program transmigrasi sebelum program transmigrasi tersebut di realisasikan, program tersebut harus di tata dengan baik, dan teliti mulai dari tahap perencanaan, penyiapan dan pemukiman, tahap pembinaan hingga pada tahap penempatan transmigrasi.³ Dengan melalui beberapa tahapan tersebut, di harapkan program transmigrasi bisa berjalan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya bertumpu pada kesejahteraan para transmigran. Dalam realitasnya, meski program transmigrasi telah di siapkan dengan melalui beberapa tahapan, tetapi masih saja terdapat program transmigrasi yang mengalami ketidakberhasilan.

Sebagai contoh program transmigrasi yang mengalami ketidakberhasilan/kegagalan adalah program transmigrasi di Donggala Sulawesi Tengah yang di berangkatkan sejak pada bulan Desember tahun 2004. dengan lokasi penempatann Desa Lende Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dalam program transmigrasi tersebut terdapat berbagai permasalahan yang pada akhirnya melibatkan beberapa pihak. Pihak- pihak yang terlibat dalam permasalahan ini adalah

² *Ibid*

³ Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1985*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 101.

Pemerintah Daerah dan Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Dinaskertrans Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah dan Propinsi DIY, Pemerintah Dinaskertrans DIY, masyarakat transmigran dan WALHI Nasional . Dalam hal ini pemerintah kedua belah pihak selaku pemberi dan penerima masyarakat transmigran sekaligus sebagai penanggung jawab program. Sedangkan masyarakat taransmigrannya adalah sebagai obyek dan pelaksana program. Sedangkan WALHI dalam hal ini yang lebih banyak terlibat adalah WALHI Sulawesi Tengah selaku organisasi Pemerinath yang membantu masyarakat transmigran dalam permasalahan yang di hadapi selama berada di lokasi transmigrasi. Keterlibatan WALHI dalam membantu transmigran disini di karenakan masyarakat transmigran adalah sebagai kaum yang lemah yang membutuhkan daya dukung dari berbagai pihak dalam menghadapi permasalahannya. Disamping itu peran Pemerintah selama dalam penanganan masalah yang ada sangat kurang. Maksudnya disini bahwa kebijakan/upaya penyelesaian yang di berikan oleh pemerintah tidak dapat menagtasi permasalahan yang terjadi pada saat itu. Sehingga WALHI pada saat itu turut peduli untuk mmebantu masyarakat transmigran karena masalah yang terjadi adalah permasalahan sosial yang juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu keberadaan WALHI pada saat itu sangat di perlukan dan di butuhkan oleh masyarakat transmigran.

Permasalahan yang ada di lokasi transmigrasi pada saat itu tidak dapat di

untuk di pulangkan ke daerah asal. Dan hamper secara keseluruhan masyarakat transmigrannya kembali ke daerah asal dengan biaya sendiri.⁴ Dalam program taransmigrasi di Donggala ini dapat dikatakan gagal atau mengalami ketidakberhasilan di karenakan adanya berbagai permasalahan. Dalam permasalahan yang ada tersebut transmigrannya dapat di katakana sebagai korban proyek tarnsmigrasi Donggala. Telebih lagi dalam permaslaahan yang ada, tidak dapat terselesaikan selama di lokasi transmigrasi. Bahkan WALHI Sulawesi Tengah yang berperan membantu tarnsmigran tidak dapat menyelesaikan masalah yang di hadapi masyarakat tarnsmigran karena pada akhirnay masyarakat transmigran memilih untuk kembali ke daerah asal masing-masing di karenakan kebijakan yang di berikan pemerintah pada saat itu tidak dapat membantu mengatasi masalah yang ada. Dalam hal ini masyarakat transmigran yang kembali kedaerah asal masing-masing hanya membawa kegagalan karena selama di lokasi transmigrasi tidak dapat melakukan kewajibannya yakni berswakarsa, sebagai mana niatnya sejak awal mengikuti program tarnsmigrasi. WALHI Sulawesi Tengah yang memmbantu dalam masalah ini hanya dapat membantu masyarakat transmigran ketika masih berada di lokasi transmigrasi saja.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah suatu forum Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sumber-sumber kehidupan rakyat, dan merespon berbagai persoalan local, regional maupun global. Karena permasalahan transmigrasi di Donggala merupakan permasalahan social dan bwerkaitan denagn faktor sumber daya alam, maka dalam hal ini WALHI membantu menangani masalah ini dengan berpihak kepada transmigran. WALHI yang terlibat sebelumnya adalah WALHI Sulawesi Tengah. Meskipun sebelumnya WALHI yang terlibat adalah WALHI Sulawesi Tengah, namun demikian apa yang dilakukan walhi Sulawesi Tengah juga merupakan tanggung jawab WALHI secara umum (WALHI Nasional). WALHI yang terlibat dalam penanganan masalah ini selain WALHI Sulawesi Tengah adalah WALHI Pusat (Jakarta), WALHI Jawa Barat, Jawa Timur dan WALHI Yogyakarta. Dalam hal ini WALHI Pusat sebagai penanggung jawab seluruh kebijakan yang di buat WALHI, WALHI Jawa Timur yang membantu perjalanan/transnsportasi ketika transmigran kembali ke daerah asal masing-masing, sedangkan WALHI Yogyakarta dan WALHI Jawa Barat sebagai forum daerah yang berada di daerah asal masing-masing transmigran. Karena permasalahan yang di hadapi transmigran tidak dapat di selesaikan di lokasi transmigrasi, maka pihak WALHI Daerah yang berada di daerah masing-masing transmigran (Yogyakarta dan Jawa Barat) merasa perlu untuk menindak lanjuti masalah ini kembali dengan

yang tidak terpenuhi ketika di lokasi transmigrasi.⁵ Dalam hal ini WALHI mencoba membantu menumbuhkan kesadaran terhadap para transmigran akan masalah yang di hadaapi dan memperjuangkan apa yang telah dan seharusnya menjadi hak-hak mereka. Yang telah terabaikan ketika di lokasi transmigrasi.

Dengan melakukan penelitian pada Forum Daerah WALHI Yogyakarta, penulis ingin mengetahui berbagai hal yang di lakukan oleh WALHI Yogyakarta dalam membantu masyarakat transmigran yang sudah kembali ke daerah asal (Yogyakarta). Dalam hal ini Walhi Yogyakarta hanya membantu masyarakat transmigran warga Yogyakarta saja karena setiap transmigran yang kembali ke daerah asal masing-masing maka Forum WALHI yang berhak atau lebih berkewajiban membantu adalah Forum WALHI daerah setempat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Peran WALHI Yogyakarta dalam membantu menangani kasus transmigrasi di Donggala Sulawesi Tengah tahun 2005?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisa bagaimana peran WALHI Yogyakarta dalam membantu menangani kasus transmigrasi yang terjadi di Donggala Sulawesi Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah

1. Dapat membuka wawasan baru, sikap kritis dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan.
2. Mendorong kita untuk dapat giat mengaplikasikan disiplin ilmu dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat sekitar.
3. Dapat mengembangkan mahasiswa khususnya bagi penulis untuk mengkaji permasalahan sosial khususnya tentang masalah transmigrasi secara lebih luas yang selama ini belum diketahui lebih mendalam

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

Menurut Koentjoroningrat :

“Teori adalah suatu pernyataan mengenai sebab akibat atau atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau di beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁷

Menurut Saifudin Azwar , MA :

“Teori adalah suatu pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian”⁸

Dari sini kerangka dasar teori yang dijelaskan meliputi hal- hal yang

berkaitan dengan pengambilan judul yaitu :

1. Peran

Peran dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengandung arti sebagai berikut:

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat “⁹

⁷ Koenjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1997, Hal.9

⁸ Saifudin Azwar, MA, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hal.39

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”¹⁰

Peran juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*)¹¹ merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut sudah menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:¹²

a. Peranan Ideal

Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, peranan ideal tersebut dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait pada status-status tertentu.

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.667

¹¹ Soeiono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 35-36

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seseorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskannya sendiri) dia harus melaksanakan peranan tertentu. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda dengan peranan ideal yang di harapkan oleh masyarakat.

c. Peranan yang di laksanakan atau dikerjakan

Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu, didalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan aktifitas atau usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu

dari kedudukan posisi atau kedudukan yang di miliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan.

2. Pemerintah Daerah

Negara Indonesia yang menganut sistem NKRI menurut pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atas asas Desentralisasi dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan UU No 22 Tahun 1999. dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan di daerah Otonom menurut asas Desentralisasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai Badan Legislatif DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan lembaga tersebut dan meningkatkan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris daerah, Dinas Daerah dan

..... Sekretaris Daerah bertanggung

membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan. Desentralisasi maupun dekonsentrasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pada umumnya Dinas Daerah meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Dinas Pariwisata
- c. Dinas Pendapatan Daerah
- d. Dinas Keagamaan
- e. Dinas Pelestarian dan Lingkungan Hidup
- f. Dinas Sosial dan Kesejahteraan masyarakat
- g. Dinas Kesehatan
- h. Dinas Pekerjaan Umum
- i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- j. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertanian
- k. Dinas Kehewan dan Kelautan

- l. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Pertambangan dan Energi
- o. Dinas Penerangan

3. Organisasi Non Pemerintah

Bank Dunia menterjemahkan Non Government Organization (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni sebagai organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan mengarahkan berbagai kepentingan orang miskin, atau memberikan pelayanan sosial dasar atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.¹³ Sebagai salah satu contoh ornop adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang memposisikan diri sebagai wahana yang memposisikan diri sebagai wahana yang mensinergikan semua potensi gerakan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. WALHI beranggotakan Organisasi non Pemerintah, Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Organisasi Rakyat (OR). Adapun kelembagaan WALHI adalah Eksekutif Nasional (Pusat) dan Eksekutif Daerah. Eksekutif Nasional WALHI adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi program kerja dan tingkat keuangan

¹³ Barry David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, 1995

Nasional yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Konsultasi NASIONAL Lingkungan Hidup (KNLH). Sedangkan Eksekutif Daerah adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) dan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH). Kelembagaan ini dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan Staf Eksekutif. Karena mempunyai otonomi sendiri, maka bentuk susunan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja sekretariat daerah disusun oleh Direktur Eksekutif Daerah masing-masing. Hingga saat ini WALHI memposisikan diri sebagai bagian dari gerakan rakyat dan gerakan sosial untuk melawan dominasi kapitalisme global dan kebijakan negara yang bertanggung jawab atas perampasan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya rakyat yang terjadi di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.

Peran dan Fungsi Ornop

Organisasi Non Pemerintah mempunyai peran dalam proses pembangunan sebuah negara.¹⁴ Peran ornop dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yakni¹⁵:

.....

2. Peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani masyarakat dengan negara/Pemerintah.

Disamping itu juga peran ornop dapat di lihat dari keberhasilan dalam menangani masalah atau kasus-kasus yang terjadi. Peran WALHI dalam permasalahan transmigrasi ini dapat di lihat sebagai peranan dalam bidang non politik. Yang mana dalam penanganannya lebih banyak bergerak dalam bidang sosail ekonominya. WALHI sebagai salah satu Ornop yang bergerak dalam bidang sosial berperan membantu menangani masalah transmigrasi di Donggala. Salah satu Forum WALHI yang berperan dalam masalah ini adalah Forum WALHI Yogyakarta.

WALHI DIY

Merupakan salah satu forum daerah WALHI yang ada di 25 Propinsi di Indonesia. WALHI DIY merupakan jaringan yang mengikat dengan fokus kegiatan pada advokasi lingkungan hidup, beranggotakan organisasi non pemerintah, kelompok pecinta alam dan organisasi rakyat yang berdiri atas kesepakatan bersama antara 20 lembaga karena adanya kesamaan visi dan misi dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang berdimensi kerakyatan.¹⁶

¹⁶ http://www.walhi.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=1

4. Program Transmigrasi

Pada masa orde baru, program transmigrasi sudah dijalankan secara reguler dari pelita kepelita. Program transmigrasi ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan dengan motivasi pemerataan atau penyebaran penduduk serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UU NO 15 Tahun 1997, bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pembangunan transmigrasi (lokasi pemukiman transmigrasi).

a. Transmigran dan Jenis Transmigrasi

1) Transmigran

Yaitu warga negara RI yang berpindah secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.

2) Jenis transmigrasi:

a) Transmigrasi Umum

Yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah. Dimana para calon transmigran akan mendapat bantuan maupun subsidi dari Pemerintah.

b) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB)

Yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha sebagai mitra usaha transmigran. Disini pemerintah hanya membantu dalam batas tertentu untuk mendukung agar kemitra usahaannya menjadi layak.

c) Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan transmigrasi yang dilakukan baik melalui kerjasama dengan badan usaha maupun sepenuhnya dikembangkan para transmigran sendiri atas arahan pemerintah.

b. Syarat Bagi Calon Transmigran

Persyaratan Umum

- 1) Warga negara RI
- 2) Beragama atau bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Sukarela
- 4) Berkeluarga atau telah menikah sah
- 5) Sehat jasmani rohani
- 6) Belum pernah melakukan perpindahan transmigrasi
- 7) Usia produktif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Persyaratan Khusus

- 1) Surat nikah (2 buku asli)
- 2) Dapat membaca dan menulis huruf latin
- 3) Usia kepala keluarga 20-40 tahun
- 4) Menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (C1) atau bukti lain yang sah untuk memperkuat status kependudukan.
- 5) Memeiliki ketrampilan bercocok tanam, terutama buruh tani atau petani pemilik < 0,25 ha dan atau telah latihan ketrampilan usaha tanaman pangan

c. Hak Transmigran

Setiap transmigran memperoleh satu buah rumah dan tiap kepala keluarga berhak memperoleh lahan yang luas disesuaikan dengan potensi daerah.

Daerah masing-masing terdiri dari;

- 1) Lahan pekarangan
- 2) Lahan usaha I
- 3) Lahan usaha II harus dibuka sendiri (hutan)
- 4) Mendapat bantuan jaminan hidup beras dan non beras yang diberikan

- 6) Mendapat bantuan perlengkapan rumah tangga
- 7) Mendapat bantuan sarana produksi pangan
- 8) Mendapat pelatihan ketrampilan bagi yang memenuhi syarat
- 9) Mendapat bantuan pelayanan antara lain bimbingan dan penyuluhan kesehatan, KB, dan pendidikan formal bagi anak usia sekolah

d. Kewajiban Transmigrasi

- 1) Mengolah lahan yang sudah diberikan
- 2) Menjaga dan memelihara dengan baik atas bantuan yang telah diterima
- 3) Menjaga dan memelihara fasilitas umum untuk kepentingan bersama
- 4) Menjaga dan memelihara lingkungan serta ketertiban umum
- 5) Menjaga dan memelihara kerukunan beragama
- 6) Mentaati semua ketentuan dan peraturan-peraturan keternsmigrasian¹⁷

Berbagai hal tersebut diatas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan atau bagi para calon transmigran yang harus dilaksanakan oleh setiap calon transmigran. Hal ini dimaksudkan supaya program transmigrasi yang dijalankan oleh Pemerintah bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi disamping terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh setiap calon transmigran maka pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan perannya dalam pelaksanaan

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 1981 tentang transmigrasi

pihak Pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Tahap perencanaan

Dalam tahap ini melibatkan beberapa disiplin ilmu yakni ilmu tanah, hidrologi, topografi, cartografi, agronomi, agro ekonomi, ekonomi, pasang surut, ahli perkebunan, dan masih bisa ditambah lagi sesuai dengan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka

2) Tahap Penyiapan dan Pemukiman

Seperti tahap pertama, tahap ini juga mengerjakan pekerjaan fisik dengan kriteria yang sangat ketat dan dikerjakan dengan intensitas tinggi.

3) Tahap Pembinaan

Yaitu tahap masuknya para transmigran kelokasi transmigrasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dengan baik yang kemudian dilanjutkan dengan pembinaan untuk mengantar para transmigran kearah pencapaian peningkatan taraf hidup

Ketiga tahap tersebut diatas perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang timbul dikemudian hari misalnya

¹⁸ *Ibid*, Sri Edi Swasono Dan Masri Singarimbun

masalah ekonomi, social, budaya, maupun masalah social yang dihadapi oleh para transmigrasi dilokasi transmigrasi.

e. Lokasi Pemukiman Transmigrasi

Dalam UU tentang ketransmigrasian dijelaskan bahwa lokasi pemukiman transmigrasi merupakan wilayah atau tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi transmigrasi yang sebelumnya telah melalui proses tahap pengembangan yakni melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengembangan serta sudah didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan pengembangannya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah.

f. Penempatan Transmigrasi

Setelah Pemerintah melaksanakan penyeleksian terhadap para calon transmigran, maka yang harus dilakukan oleh manajemen transmigrasi adalah penempatan bagi para calon transmigran. Penempatan lokasi transmigrasi yang tepat tentunya menjadi harapan dari berbagai pihak, terutama bagi para calon transmigran. Dengan begitu para calon transmigran akan mengerti ruang lingkup lokasi transmigrasi serta akan mendapat gambaran tentang kondisi lingkungan sehingga para calon transmigran akan timbul semangat untuk maju dan berusaha

dilaksanakan setelah para calon transmigran mendapat kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Selain setelah adanya kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal, namun terlebih dulu para calon transmigran telah lulus seleksi diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan dengan kebutuhan pengembangan. Dalam masalah penempatan transmigrasi, ada beberapa factor yang harus dipertimbangkkn. Untuk menempatkan para transmigran yang sudah lulus seleksi dan serta sudah memiliki kepastian kesempatan kerja dan usaha, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki oleh para calon transmigran. Faktor-faktor tersebut antara lain; faktor akademis, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan dan usia.

1) Faktor Akademis

Secara akademis para calon transmigran minimal harus dapat membaca dan menulis latin. Disini jenjang pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur, baik itu tidak tamat SD, SLTP, maupun SLTA

2) Kesehatan Fisik dan Mental

Para calon transmigran harus sehat jasmani dan rohani

3) Status Perkawinan

Bagi para calon transmigran baik itu yang sudah menikah ataupun belum menikah harus disertai dengan tanda bukti akan status yang ada.

4) Usia bagi calon transmigran

Usia bagi calon transmigran adalah usia produktif (20-40) tahun.

F. Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun, konsep adalah suatu unsur yang terpenting untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial maupun fenomena alam.¹⁹ Secara umum dapat dikatakan bahwa definisi konseptual dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan terhadap masing-masing konsep yang terkandung dalam istilah-istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Dengan kata lain definisi konseptual dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas guna menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian, atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batasan pengertian konseptual dalam pengertian ini adalah:

1. Peran

Adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok dalam mengambil bagian dibidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktifitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP2ES, Jakarta, 1990, hal 12

2. Pemerintah Daerah

Adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

3. Organisasi Non Pemerintah

Merupakan suatu organisasi di luar instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial, dengan lebih berpihak atau membantu masyarakat lapisan bawah. **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia**

Merupakan suatu forum yang beranggotakan Kelompok Pecinta Alam, organisasi Rakyat dan Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang sosial dan kerakyatan dengan fokus kegiatan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

4. Program Transmigrasi

Yaitu suatu program Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perpindahan penduduk secara sukarela. Dengan memberikan kesempatan berusaha kepada setiap calon transmigran melalui bantuan atau subsidi yang diberikan oleh

1. Peranan dalam bidang non politik
 - a. Mediator.
 - b. Motivator.
 - c. Fasilitator.
 - d. Melakukan jaringan kerjasama dengan WALHI Nasional (Pusat dan Daerah) serta pihak-pihak yang turut peduli terhadap masalah ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi WALHI dalam penanganan kasus transmigrasi
 - a. Faktor Pendukung
 - Faktor Sosial Ekonomi
 - Faktor Lingkungan Geografis
 - b. Faktor Penghambat
 - Kurangnya koordinasi
 - Kurangnya komunikasi
 - Kurangnya partisipasi masyarakat transmigran

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian dalam

arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, obyek, kondisi dalam system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang terjadi.²⁰ berkaitan dengan masalah yang diangkat, dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana peran yang sudah dilakukan oleh pihak WALHI Yogyakarta dalam penanganan kasus transmigrasi di Donggala tahun 2004-2005.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah wilayah kerja WALHI Yogyakarta. dikarenakan adanya permasalahan yang muncul di lokasi transmigrasi Donggala Sulawesi Tengah sejak akhir tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2005. sehingga penulis tertarik untuk menganalisa bagaimanakah upaya WALHI dalam membantu menangani kasus yang ada,

mengingat selama adanya kasus tersebut WALHI telah banyak berperan dalam menangani kasus tersebut.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan secara langsung dari pihak-pihak atau narasumber yang terkait dalam penelitian, sehingga informasi yang didapat dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan. Data primer ini terutama diperoleh dari WALHI Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur yakni dengan mempelajari buku-buku panduan, internet, media cetak/massa serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Unit Analisa Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

a. WALHI Yogyakarta

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, media massa serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan pihak LSM serta dengan narasumber yang pernah menjadi transmigran di Donggala Sulawesi Tengah 2004-2005. Wawancara yang dilakukan adalah secara langsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang sedang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisis data, maka akan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi focus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas

11 | *Uji Kompetensi Keahlian: Analisis dan Interpretasi Data*

diinterpretasikan kebenarannya. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam proses analisis data menurut Moloeng adalah analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²¹

²¹ S. M. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. 102, Remaja Rosdakarya, Bandung.